

Studi Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo

Nirmala Afrianti Sahi

Abstract: *The widely opening of the democratic system in Indonesia provides a good opportunity for the development of the nation's politics. One of the indicators is the running of a democratic political system and measuring the level of public participation is the involvement of citizen participating in elections. The purpose of this study was to determine the political participation of women in the District of Gorontalo and the obstacles faced by women politicians in Gorontalo District at the period of 2009-2014.*

The methodology used was a descriptive qualitative analysis. Primary data were collected through structured interviews and observation. The secondary data obtained from research reports, journals, and the data available in each political party, the KPU, and the institution associated with the election. The sample consisted of 10 informants of women politicians, election commission, NGOs, head women's empowerment, academicians, and leaders of the party.

The result showed that women's political participation is still low in Gorontalo District. It is suggested women politicians should enhance their capacity building, networking with women's organizations and NGOs as well as the need for the party's commitment to give priority to women.

Keyword: *Women's Political Participation*

Tuntutan terhadap peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999, ketika negeri ini, khususnya pemerintah dan partai-partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan pemilu. Pada Pemilu 1999 tersebut, untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan juga dikedepankan dalam kampanye pemilu yang berlangsung. Hasil Pemilu 1999, mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri (seorang perempuan) sebagai pemimpin yang paling populer dan partai yang dipimpinya PDI-P, mendapat suara terbesar dalam Pemilu. Namun, jika melihat capaian kuantitatif komposisi parlemen hasil Pemilu 1999 ini, jelas merupakan kemunduran, karena minimnya representasi perempuan, yang hanya mencatat angka 9%. Ketika Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), banyak harapan ditumpahkan padanya.

Kondisi di atas menunjukkan keterwakilan perempuan di Parlemen masih sangat timpang. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, salah satunya yaitu permasalahan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat yang telah terakumulasi sejak lama dan berimbas di bidang politik. Keterlibatan perem-

Nirmala Afrianti Sahi adalah dosen FISIPOL Universitas Gorontalo

puan dalam proses politik formal telah mengalami perkembangan positif selama tiga tahun terakhir di banyak negara. Sayangnya, pemilu 1999 yang dianggap paling demokratispun, tidak mendorong perkembangan yang serupa di Indonesia. Perempuan Indonesia masih belum terwakili secara signifikan di lembaga politik formal, bahkan terjadi penurunan jumlah wakil perempuan di DPR dari pemilu sebelumnya (lihat "Data dan Fakta: Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif 1999-2001") Menyikapi kondisi ini, Centre for Electoral Reform (CETRO), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia memberikan beberapa catatan kritis tentang peranan perempuan Indonesia dalam politik formal 1999-2001:

1. Belum adanya jumlah perempuan yang signifikan baik di yang duduk sebagai pengurus partai politik maupun yang berada dalam DPR.
2. Politik adalah saluran terpenting yang menjadi penghubung rakyat dan negara, dan DPR adalah lembaga legislatif yang menentukan arah kebijakan negara. Sehingga aspirasi lebih dari 50% rakyat Indonesia yang nota bene adalah perempuan tidak tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan penting dalam kehidupan bernegara.
3. Partai politik, pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik dan terlalu mendominasi proses politik saat ini. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki. Dan perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili dalam lembaga politik, untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.
4. Pemilu yang dianggap demokratispun belum cukup untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sebuah mekanisme yang strategis dan transparan perlu diterapkan untuk membuka kesempatan bagi perempuan agar dapat memasuki arena politik formal secara lebih leluasa.

Gaffar (2001) mengemukakan bahwa hambatan bagi perempuan masuk ke dunia politik menurut karena konstruksi sosial kita yang membuat perempuan tidak memungkinkan untuk berperan secara aktif dalam politik. Sedikit jumlah perempuan yang terjun di dunia politik ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama yang paling menentukan adalah kuatnya pandangan subordinasi terhadap perempuan. Perempuan diragukan kemampuannya ketika harus memegang jabatan-jabatan politik. Di samping itu, masyarakat memandang dunia politik sebagai dunia yang penuh dengan "kekerasan", sebagai *arena struggle of power*. Akibatnya, banyak yang menganggap dunia politik adalah dunia laki-laki (Usman, 1998)

Huntington dan Nelson (1994) mengemukakan, bahwa keterlibatan dalam politik adalah sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Budiardjo (1996) mengatakan, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Selanjutnya, Maran (2001) mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan *umum*.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, dapat dikemukakan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik menggambarkan rendahnya peran kaum perempuan dalam menentukan arah kebijaksanaan baik pada tingkat daerah maupun tingkat negara.

Pada pemilu 2009 dengan ditetapkannya undang-undang tentang suara terbanyak, maka peluang besar bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik untuk jadi pilihan rakyat, namun kenyataannya tidak, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk lebih intens dalam perjalanan sosialisasi, kampanye dengan alasan rumah tangga dan alasan medan yang ditempuh tidak memungkinkan bagi perempuan, serta masalah finansial, sehingga banyak perempuan di Kabupaten Gorontalo kurang berperan aktif dalam memainkan peran mereka di dunia politik, mereka memandang partai politik secara pesimistis akibat dari minimnya kesempatan yang diberikan oleh partai politik, juga didasari oleh beberapa kendala yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian seputar partisipasi politik Perempuan dengan mengetengahkan masalah tentang "Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Gorontalo".

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini berfokus pada partisipasi politik perempuan Di Kabupaten Gorontalo, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh politisi perempuan di DPRD Kabupaten Gorontalo Periode 2009-2014. Informan utama dalam penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan di Kabupaten Gorontalo periode 2009-2014 yang berjumlah 6 orang. Informan lainnya adalah ketua DPRD 1 orang, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo 1 orang, Akademisi yang berkompeten pada pemberdayaan perempuan 1 orang, Kepala pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gorontalo 1 orang.

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel maka dipilihlah tehnik yang tehnik penelitian digunakan adalah pengamatan (*Observasi*), dan wawancara (Nawawi, 1987). Sedangkan tehnik analisis data penelitian ini adalah menggambarkan partisipasi perempuan dalam pemilu di Kabupaten Gorontalo, dimana data penelitian diperoleh dari wawancara terbuka. Selain itu juga, analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*) terhadap data di lapangan, analisis dilakukan dengan menghubungkan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan (Sugiyono. 2005).

RANGKUMAN HASIL PENELITIAN

Rangkuman hasil penelitian partisipasi politik perempuan di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

1. Berdasarkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Gorontalo. Tentang bagaimana partisipasi politik perempuan di Kabupaten Gorontalo Secara umum partisipasi Politik Perempuan dilihat dari akumulasi pemilih tetap perempuan lebih banyak dari laki-laki tapi keinginan mereka datang keTPS sangat kurang terdata 19% mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Alhasil partisipasi politik perempuan yang duduk di DPRD masih sangat kurang.

2. Keterwakilan perempuan di legislatif jangan hanya dilihat dari segi kuantitas yang tercermin dari banyaknya perempuan yang menjadi anggota DPR, tetapi harus disertai dengan kualitas yang memadai. Hal ini sulit terwujud selama parpol tidak memiliki kader perempuan yang berkualitas seperti yang terjadi selama ini. Oleh Karena itu Parpol harus menciptakan system pengkaderan yang adil dan terbuka untuk perempuan.
3. Keberadaan keterwakilan perempuan di legislatif tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena suara di DPRD yaitu bukan suara individu perempuan tetapi suara parpol dan fraksi, semua anggota legislatif, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang.
4. Perbedaan jumlah partisipasi politik antara perempuan dengan laki-laki. Sebagian besar responden mengatakan bahwa masih tergantung pada lingkungan keluarga maksudnya apakah lingkungan keluarga memadai atau tidak memberikan ruang bagi perempuan dalam partisipasi politik, karena berpolitik ini di samping modal pendidikan dan pengalaman oraganisasi tetapi harus juga ditunjang oleh modal financial yang cukup. Dari jumlah anggota legislatif sekarang sudah menampakkan peran dan keterlibatan kaum perempuan. Meskipun Dari jumlah calon dan anggota terpilih dari unsur perempuan setiap periodenya mengalami penurunan.
5. Dukungan kaum laki-laki terhadap kesetaraan gender, sebagian besar responden mengatakan bahwa kuota perempuan yang 30% di anggota parlemen, sudah merupakan langkah awal bahwa kirprah perempuan mulai mendapat simpati dari parlemen publik, walaupun pada kenyataanya kuota 30% belum tercapai/terpenuhi. Dari jumlah anggota legislatif sekarang sudah menampakkan peran dan keterlibatan kaum perempuan. Dari jumlah calon dan anggota terpilih dari unsur perempuan meskipun setiap periodenya mengalami penurunan. Sebab ini dapat dilihat dari kuota yang telah disediakan tidak optimal atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Sebenarnya dari kaum laki-laki sudah memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk maju tanpa harus melihat dari segi jenis kelamin. Tapi ini dikembalikan kepada kaum perempuan sendiri apakah ada keinginan untuk maju atau tidak.

PEMBAHASAN

Perjuangan perempuan dalam pembahasan RUU sampai UU Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota perempuan 30%, mengubah paradigma berpikir yang patriarkis ke cara berpikir kesetaraan gender. Ideologi patriarki yang menganut pembagian kerja secara seksual terus dipertahankan oleh para ahli filsafat yang terkenal sepanjang sejarah manusia seperti Aristoteles, Whitbeck, Engels, dan lain-lain. Stuart Mill pada tahun 1869 telah menggugat pandangan ini dan mengatakan apa yang disebut sifat perempuan atau laki-laki adalah hasil pendidikan. Kenyataan telah berlalu berabad-abad tetapi konsep Mill yang lebih melihat adanya rekayasa politik untuk tetap mengunggulkan laki-laki masih tetap diperdebatkan dan belum diterima.

Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi

wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya. Menurut pasal 27 UUD 1945, “wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria”, dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD 1945 tersebut, telah tercermin bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa presentase jumlah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif selama ini masih kurang, demikian pula halnya dengan perempuan yang memegang posisi jabatan pengambil keputusan.

Sejumlah partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi lebih banyak yang memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan keuangan, konsumsi dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebahagian besar partai politik memenuhi batas minimum kuota 30% perempuan, namun karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakkan. Faktor kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader srikandi yang mempunyai potensi dan melihat kualitas bukan kuantitas istri siapa, pekerjaannya apa, uangnya berapa, sehingga ke depan partai politik akan bangga dan lebih bijak menampilkan kader perempuannya menjadi wakil rakyat.

Kendala Yang dihadapi Politisi Perempuan di DPRD sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala Internal yang dimaksud adalah yang berasal dari diri politisi perempuan itu sendiri, seperti: (1) Kurangnya pemahaman politisi perempuan terhadap kebutuhan perempuan. (2) Pandangan subordinan dari masyarakat Gorontalo yang memberikan kedudukan kepada kaum perempuan sebagai seorang yang nomor dua karena peran sehari-harinya hanya berkutat pada ranah domestik (dalam rumah) sebagai istri dan mengurus anak-anak yang dilahirkan, namun disisi lain ada pula yang menganggap perempuan sebagai partner hidupnya.. (3) Kebanyakan kaum perempuan Kabupaten Gorontalo tidak memiliki percaya diri bahkan yang lebih dominan adalah rasa minder atau rendah diri apabila diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu kegiatan atau jika ditugaskan untuk memimpin suatu kegiatan. (4) Posisi Politisi Perempuan di DPRD yang kurang Strategis, (5) Konflik peran yang dialami Politisi Perempuan.

2. Kendala Eksternal

Beberapa kendala yang bersifat Internal di atas disebabkan oleh kendala yang bersifat eksternal seperti: (1) System nilai dan budaya yang ada dimasyarakat yang memperlakukan laki-laki lebih bernilai daripada perempuan berakibat posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. (2) Budaya patriarki sangat kental dalam masyarakat kita, selain itu karena SDM dari kaum perempuan masih lemah. (3) Minimnya pendidikan partai politik oleh partai politik yang berbasis kebutuhan gender.

Kendala partisipasi politik perempuan di kabupaten Gorontalo

berdasarkan observasi dan hasil wawancara, di sesuaikan dengan teorinya teori F. Winarni memiliki hubungan yang erat. Dimana kendala yang menonjol adalah kendal internal, yakni sebagian besar perempuan kabupaten Gorontalo yang masih enggan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan-keinginan dibidang politik. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan yang kurang memadai dan kepercayaan pada diri sendiri, Sehingga aktivitas politik dianggap tidak layak untuk perempuan, karena sifat-sifatnya yang berjauhan dari citra untuk perempuan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perekrutan politik adalah :

Kendala bagi perempuan dalam proses rekrutmen politik pada hakekatnya merupakan satu kondisi sosial yang menyebabkan perempuan tidak berperan secara maksimal dalam proses berpolitik dengan suatu pandangan bahwa perempuan itu diragukan kemampuannya ketika memegang satu jabatan baik pada bidang pemerintahan, publik maupun politik. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandangan subordinasi terhadap perempuan, di mana perempuan diragukan kemampuannya dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Masyarakat juga memandang dunia politik sebagai dunia yang penuh dengan “kekerasan”, “kotor”, sehingga dianggap tidak cocok untuk citra perempuan bahkan sebaliknya pandangan masyarakat dunia politik merupakan dunia laki-laki.

Pemahaman di atas memberikan pengaruh yang besar terhadap partisipasi dan fungsi perempuan dimata masyarakat, dimana perempuan kurang diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa kendala yang dikatakan sebagai penghambat kaum perempuan untuk terlibat dalam bidang politik yang sekaligus sebagai penentu kurangnya perempuan dalam menduduki posisi-posisi penting dan strategis serta menghambat proses rekrutmen yang ada di Gorontalo, sebagai berikut:

1. Pengaruh Aspek Sosial Budaya

Rekrutmen politik merupakan wadah untuk penarikan atau pengkaderan anggota bagi suatu institusi atau partai politik. Mekanisme rekrutmen politik amat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, terutama berkaitan dengan keterbukaan masyarakat bagi peran kaum perempuan dalam aktivitas sosialnya. Untuk Masyarakat Kabupaten Gorontalo, maka peran perempuan berkaitan dengan budaya yang memposisikan perempuan pada lembaga perkawinan, terutama pada keluarga di kalangan kerabat keraton.

Pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa budaya masyarakat Gorontalo mempunyai nilai sosial dan historis yang sangat tinggi dalam mempengaruhi perilaku masyarakat Gorontalo pada umumnya. Nilai sosial ini secara tidak langsung telah memberi status yang jelas bagi kedudukan kaum perempuan, dimana tugas utama mereka adalah melayani semua kebutuhan kaum laki-laki dan urusan rumah tangga keluarga. Kondisi ini menutup peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan Gorontalo untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, sehingga agak sulit untuk menentukan jati diri mereka.

Fenomena sosial budaya ini memang semakin berkurang pengaruhnya pada wilayah pusat pemerintahan di Kabupaten Gorontalo dan bagi komunitas di masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Karena itu upaya perbaikan jangka panjang dapat dilakukan melalui intervensi faktor pendidikan maupun

pengaruh modernisasi yang ada. Di bidang politik pengaruh budaya penindasan pada perempuan sebenarnya tidak dirasakan secara langsung, hanya saja ruang gerak dan kesempatan bagi kaum perempuan di Kabupaten Gorontalo belum terbuka lebar. Diperlukan upaya dan jaringan tertentu bagi seorang perempuan untuk berkisah di dunia politik, yang kebanyakan dan secara umum hanya didominasi oleh kaum laki-laki.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor tingkat pendidikan dan pengalamannya berorganisasi mempunyai pengaruh terhadap keterlibatan seseorang di dalam organisasi sosial, organisasi massa maupun organisasi partai politik. Tingkat pendidikan menunjukkan tingkat wawasan dan intelektual yang dimiliki seseorang, sehingga diharapkan memiliki nilai (kapasitas) dalam berkisah di dunia politik yang dinamika lebih tinggi dari organisasi lainnya.

Faktor pendidikan mempunyai peran yang dominan, pada awalnya bagi seseorang untuk berkisah atau berprofesi sebagai politikus. Namun untuk selanjutnya kematangan dan pengalaman berorganisasi mempunyai pengaruh dan peran yang dominan, karena aktivitas di dunia politik membutuhkan keterampilan tersendiri dalam mengolah setiap isu-isu yang ada, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal, untuk mencapai tingkat efektivitas individu maupun pada tingkat efektivitas organisasi atau partai politik.

3. Pengaruh Lingkungan Keluarga

Kesuksesan seseorang secara norma dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keluarga yang merupakan lingkungan terdekat dan terkecil bagi seseorang, sebagai lembaga yang memberikan dukungan baik secara materiil maupun secara spiritual. Faktor lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perilaku individu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan baik melalui organisasi massa, sosial maupun politik. Pada kenyataannya terlihat bahwa rata-rata anggota partai atau pengurus partai yang perempuan semuanya berdomisili atau bertempat tinggal di kawasan perkotaan. Pilihan perempuan untuk tujuan ke dunia politik salah satunya dilatarbelakangi oleh pandangan atau nilai untuk mengubah taraf hidup atau memperoleh pendapatan (penghasilan) yang lebih tinggi atau lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disesuaikan dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, bahwa “Bagaimana partisipasi politik perempuan di kabupaten Gorontalo, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: “

1. Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Gorontalo masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kedudukan yang sama seorang politisi perempuan belum tentu memiliki peran yang sama, karena banyak kendala yang dihadapi antaranya, tingkat pendidikan, latar belakang organisasi, pengalaman, dan intens komunikasi yang dibangun politisi perempuan dengan orang lain. Peran Politisi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam pengambilan keputusan atau partisipasi dalam mengkaji kebutuhan gender belum optimal, baik dalam mekanisme formal seperti pada saat rapat fraksi, dan komisi, maupun dalam penggunaan teknik lobi dan konsolidasi. Dari hasil pantauan hanya 2 orang yang aktif dalam kegiatan tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh rendahnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Gorontalo adalah kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri yang mempengaruhi secara langsung pribadi perempuan dalam memutuskan masuk dalam kancah politik, dan Kendala eksternal yaitu yang berasal dari luar perempuan yaitu terbatasnya perempuan dalam lembaga pengambilan kebijakan, jumlah struktur, kebijakan kualitas perempuan dalam berpolitik, keikutsertaan perempuan dan azas demokrasi, sistem budaya patriarki, kuatnya nilai tradisional dan agama, dan peluang 30% perempuan masuk dalam kancah politik. Peran aktif partisipasi perempuan di kabupaten Gorontalo belum mampu menunjukkan manifestasi dari sebuah emansipasi wanita. Pandangan tradisional yang sangat prevalen menempatkan perempuan pada posisi yang tidak pantas untuk menjadi saingan.

2. Saran

1. Mengapa politisi perempuan tidak mampu memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen hal itu disebabkan oleh mereka “ politisi perempuan” itu sendiri. Untuk mencapai derajat keterlinatan yang tinggi maka politisi perempuan harus meningkatkan SDM-nya dengan mengikuti pendidikan politik, dan pelatihan-pelatihan gender, sebab “Innallaha Laa Yugoyyiru Maa Biqoumin Hatta Yugoyyiru Ma Bianfusih”, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Hendaknya politisi perempuan juga membangun jejaring dengan Ormas dan LSM perempuan dalam bentuk konsorsium atau Koalisi. Dengan kerjasama ini ada dua keuntungan yang didapat. *Pertama:* meningkatkan pengalaman, dan kredibilitas. *Kedua:* meningkatkan Bargaining Position dengan pihak pengambilan keputusan.
2. Diperlukan adanya komitmen partai untuk memberikan prioritas pada perempuan. Penempatan seseorang di komisi, dan alat kelengkapan lainnya di dewan ditentukan oleh partai, maka hendaknya partai memperhatikan latar belakang pendidikan, kapasitas, dan minat perempuan dalam penentuan posisi di dewan sehingga kinerja politisi perempuan menjadi maksimal membangun kemitraan dengan anggota legislatif laki-laki yang mengerti persoalan-persoalan perempuan, mengingat sebagian besar laki-laki justru lebih peduli pada isu perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Putu Nantri. 2004. “Perempuan dan Politik”. Jurnal Perempuan (online).
- Gaffar, Afan, 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Huntington, dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta. Jakarta
- Maran, R. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiarjo, M. 2008, *Pengantar Politik Indonesia*, PT Pustaka Yogyakarta.
- Nawawi, H.1987. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- Usman, S. 1990. *Elite dalam Perspektif Sosiologi. Laporan Penelitian*. Fisipol UGM. Yogyakarta.